

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pembangunan**

Menurut Sadono Sukirno, walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebagian dari usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan di atas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, menjaga kestabilan harga, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah merupakan

suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad dalam Ahmad).

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau penduduk itu dapat memperoleh pekerjaan maka hal ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya (Irawan dan Suparmoko,2002:25).

### **1. Teori Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk. Di dalamnya, tersedia lahan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga

kerja yang produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu individu, perusahaan, bahkan negara. Pembangunan merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan yang terus menerus menuju tujuan yang diinginkan, yaitu peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro (2003), tujuan pembangunan antara lain :

1. Meningkatkan *stock* dan pemerataan kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan keamanan.
2. Meningkatkan kualitas hidup yang tidak hanya dilihat dari adanya peningkatan pendapatan. Peningkatan standar hidup tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan penanaman nilai kultural dan kemanusiaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan derajat / harga diri pribadi dan bangsa di mata pribadi atau bangsa lainnya.
3. Meningkatkan kemandirian agar tidak semakin tergantung dengan bangsa lain.

## **2. Masalah-Masalah dalam Pembangunan Ekonomi**

Masalah pembangunan merupakan suatu jalinan eksistensi dari masalah sosial dan ekonomi. Masalah yang dihadapi antara lain kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor ekonomi yaitu faktor ekonomi (Sumber Daya Alam

(SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Pembentukan modal dan teknologi) dan faktor non ekonomi (politik, sosial, budaya dan kebiasaan).

Pada prinsipnya masalah pembangunan yang dihadapi negara yang sedang berkembang terletak pada hasil pembangunan di masa lampau (Suryana dalam Afrizal, 2013)

## **B. Produksi**

### **1. Fungsi Produksi**

Fungsi produksi merupakan hubungan teknis antara faktor produksi (input). Faktor produksi merupakan hal yang mutlak dalam proses produksi karena tanpa faktor produksi kegiatan produksi tidak akan menggambarkan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan, suatu industri atau suatu perekonomian secara keseluruhan. Disamping itu, fungsi produksi juga menggambarkan tentang metode produksi yang efisien secara teknis, dalam arti dalam metode produksi tertentu kuantitas bahan mentah yang digunakan adalah minimal dan barang modal yang lainpun minimal. Metode produksi yang efisien merupakan hal yang sangat diharapkan oleh produsen .

Secara umum fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah barang produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang digunakan. Fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut :

$$Q = f (K,L,R,T)$$

Keterangan:

Q= output (produksi)

K=kapital(modal)

L=Labour(Tenaga kerja)

R=Resource(bahan baku)

T=Teknologi

Persamaan tersebut merupakan persamaan matematis yang berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, tenaga kerja dan bahan baku yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda akan memerlukan jumlah faktor-faktor produksi yang berbeda pula, namun untuk tingkat produksi tertentu dapat digunakan gabungan atau kombinasi dari faktor-faktor produksi yang berbeda.

## **2. Modal Produksi**

Di dalam setiap perekonomian, perusahaan-perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan dan memperbesar usahanya. Menurut Sukirno (2009), modal dapat diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Modal juga dapat diartikan pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli/memperoleh barang-barang modal yang baru yang lebih modern

atau untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi atau yang sudah usang.

Modal adalah sumber-sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang modal dilihat dalam arti uang atau dalam arti keseluruhan nilai daripada sumber-sumber ekonomi non manusiawi termasuk tanah. Itulah sebabnya bila menunjuk pada modal dalam arti luas dan umum, akan dimasukkan semua sumber ekonomi di luar tenaga kerja. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru (Mubyaro dalam devi, 2014).

Menurut Soekartawi dalam Devi, modal dalam kegiatan produksi dibedakan menjadi dua macam yaitu modal tetap dan modal tidak tetap atau variabel.

Modal tetap didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi. Modal ini terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan sebagainya. Sementara itu modal tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali proses produksi.

### **3. Modal Tenaga kerja**

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa disamping faktor, modal, bahan

baku, dan teknologi. Penggunaan tenaga kerja sebagai variabel dalam proses produksi lebih ditentukan oleh pasar tenaga kerja, dalam hal ini dipengaruhi oleh upah tenaga kerja serta harga outputnya (Nopirin dalam Devi, 2014).

Produktivitas tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah, oleh karena itu upah yang memadai sangat mempengaruhi dalam proses produksi.

#### **4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah/provinsi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDRB dan bukan indikator lainnya seperti misalnya, pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator pertumbuhan. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian dalam suatu daerah/provinsi. Hal ini berarti peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
- b. PDRB dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*), artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran guna menghitung PDRB, memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

- c. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah suatu provinsi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah daerah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total keseluruhan dari nilai tambah yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah. Data PDRB menggambarkan potensi sekaligus kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki dalam suatu proses produksi, sehingga PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang tersedia (BPS, 2007).

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung (BPS, 2007).

A). **Metode Langsung** adalah metode penghitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Metode langsung akan dapat memperlihatkan karakteristik sosial ekonomi setiap daerah. Disamping itu manfaat pemakaian data daerah adalah dapat digunakan untuk menyempurnakan data statistik daerah yang lemah. Metode ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda, namun akan memberikan hasil penghitungan yang sama.



Penghitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut:

1). PDRB menurut pendekatan dari segi produksi, adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi output dari masing-masing sektor atau sub sektor dengan biaya antaranya. Pendekatan ini bisa juga disebut pendekatan nilai tambah. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara (*intermediate cost*), yaitu bahan baku atau penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Tarigan dalam Ahmad, 2011). Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi. Dalam prakteknya, produk ini dihitung berdasarkan sektor-sektor yang menghasilkannya, yaitu (Suherman dalam Ahmad, 2011):

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Listrik, Gas, dan Air bersih
5. Sektor Bangunan
6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
8. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

## 9. Sektor Jasa-Jasa

2). PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan ini, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS 2007). Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus usaha adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan ini banyak dipakai pada sektor yang produksinya berupa jasa seperti sektor pemerintahan.

3). PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran. PDRB pendekatan pengeluaran adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS 2007).

B). **Metode Tidak Langsung** adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu mengalokir PDB Nasional menjadi PDRB Provinsi dengan menggunakan beberapa indikator produksi dan atau indikator lainnya yang cocok sebagai alokator. Metode tidak langsung adalah menghitung PDRB

Provinsi dengan cara mengalokir angka Produk Domestik Bruto Indonesia untuk tiap provinsi dengan menggunakan alokator tertentu, alokator yang digunakan dapat berupa :

- a) Nilai produk bruto atau neto setiap sektor
- b) Jumlah produksi fisik
- c) Tenaga kerja
- d) Penduduk
- e) Alokator lainnya yang sesuai.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa alokator tersebut dapat diperhitungkan persentase atau bagian masing-masing provinsi untuk nilai tambah suatu sektor atau sub sektor (Tarigan dalam Ahmad, 2011).

Produk Domestik Regional Bruto dapat disusun dalam dua versi, yaitu :

1. Pertama, PDRB yang disusun berdasarkan harga konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi yang digunakan untuk penghitungan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun (tidak dipengaruhi inflasi).
2. Kedua, PDRB yang disusun berdasarkan harga berlaku, hal ini digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita, yang merupakan

indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat, dimana semakin tinggi PDRB per kapita, maka semakin makmur negara atau daerah yang bersangkutan (Irawan dalam Ahmad, 2011).

### **C. Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya.

Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut.

IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

### **1. Definisi Pembangunan Manusia**

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhannya ekonominya.

Sebagaimana laporan UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian;
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan

mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata

- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal;
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan;
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

## **2. Indeks Pembangunan Manusia**

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan. Badan Dunia yang menangani program-program pembangunan, yaitu *United Nation Development Program (UNDP)* telah menyusun indeks komposit berdasarkan 3 (tiga) indikator. Ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup
2. Indikator Pendidikan, yang terdiri dari:

- a) Angka Melek Huruf.
- b) Rata-rata lama sekolah.

3. *Purchasing Power Parity* (PPP) yang merupakan ukuran pendapatan yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Indikator pertama mengukur umur panjang dan kesehatan, kemudian dua indikator berikutnya mengukur tingkat pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*), serta mengukur kemampuan mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas berupa paritas daya beli. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dasar dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### **Penghitungan IPM**

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$\mathbf{IPM} = \frac{1}{3} [\mathbf{X}_{(1)} + \mathbf{X}_{(2)} + \mathbf{X}_{(3)}] \quad \text{..... (1)}$$

dimana :

$\mathbf{X}_{(1)}$  : Indeks harapan hidup

$\mathbf{X}_{(2)}$  : **Indeks pendidikan =**

$$\frac{2}{3}(\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3}(\text{indeks rata-rata lama sekolah})$$

$\mathbf{X}_{(3)}$  : Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai

maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut ;

$$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{[X_{(i)\max} - X_{(i)\min}]} \quad \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

$X_{(1)}$  : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)

$X_{(2)}$  : Nilai maksimum sekolah  $X_{(i)}$

$X_{(3)}$  : Nilai minimum sekolah  $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator  $X_{(i)}$  disajikan pada tabel 6

**Tabel 7. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM**

<b>Indikator Komponen IPM (=X(I))</b>	<b>Nilai maksimum</b>	<b>Nilai Minimum</b>	<b>Catatan</b>
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 <sup>a)</sup>	300.000 <sup>b)</sup>	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Catatan: a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1993-2018.



b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1990 di daerah pedesaan Sulawesi Selatan dan tahun 2000 di Irian Jaya. Konsumsi per kapita yang disesuaikan untuk tahun 2000 sama dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan tahun 1996.

**a. Indeks Harapan Hidup**

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel  $e_0$  diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel).

Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya menggunakan indikator yang bersangkutan sesuai dengan standar global yang telah ditentukan oleh UNDP.

**b. Indeks Pendidikan**

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

**c. *Purchasing Power Parity / Paritas Daya Beli (PPP)***

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan *real per kapita GDP adjusted*. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar

provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP dengan tahapan sebagai berikut (berdasarkan ketentuan UNDP):

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per tahun untuk 27 komoditi dari SUSENAS Kor yang telah disesuaikan (=A).
- b. Menghitung nilai pengeluaran riil (=B) yaitu dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan IHK tahun yang bersangkutan.
- c. Agar indikator yang diperoleh nantinya dapat menjamin keterbandingan antar daerah, diperlukan indeks "Kemahalan" wilayah yang biasa disebut dengan daya beli per unit (= PPP/ Unit). Metode penghitungannya disesuaikan dengan metode yang dipakai *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Data yang digunakan adalah data kuantum per kapita per tahun dari suatu basket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul sesuai ketentuan UNDP.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Pendidikan mempunyai tujuan yang lebih dari mempersiapkan seorang pekerja yang produktif. Hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan (UNDP dalam Ahmad, 2011).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, setidaknya terdapat dua tuntutan yang perlu dimiliki. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai sebagai aset pembangunan. Kedua, penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kualitas SDM diantaranya dapat ditunjukkan dengan pencapaian angka melek huruf dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Karena pada dasarnya, pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam mengekspresikan kreativitas dan inovasi serta pengembangan wawasannya.

Hubungan antara pertumbuhan PDRB dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan PDRB menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan secara berkelanjutan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi.

## **D. Tenaga Kerja**

### **1. Pengertian Tenaga Kerja**

Menurut Dumairy (1996) tenaga kerja adalah Penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara satu dengan negara yang lain. Batas kerja yang di Indonesia ialah minimum 10 tahun, tanpa batas umum maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk yang sudah berusia 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan.

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi yang dimaksud tenaga kerja dalam penelitian ini yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang yaitu melakukan proses produksi. Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja terdiri dari (1) Golongan yang bekerja dan (2) Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari:

(1) Golongan yang bersekolah, (2) Golongan yang mengurus rumah tangga dan (3) Golongan lain- lain yang menerima pendapatan, misalnya orang yang memperoleh tunjangan pensiun, bunga atas pinjaman dan sewa milik dan mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain karena lanjut usia, cacat, dalam penjara atau sakit kronis. Ketiga golongan bukan angkatan kerja sewaktu- waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.

(Simanjuntak dalam Devy, 2014).

Ada empat hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu:

1. Bekerja (*employed*) Jumlah orang yang bekerja sering dipakai sebagai petunjuk tentang luasnya kesempatan kerja. Dalam pengkajian ketenagakerjaan kesempatan kerja sering dipicu sebagai permintaan tenaga kerja.
2. Pencari kerja (*unemployed*) Penduduk yang menawarkan tenaga kerja tetapi belum berhasil memperoleh pekerjaan dianggap terus mencari pekerjaan. Secara konseptual mereka yang dikatakan penganggur harus memenuhi persyaratan bahwa mereka juga aktif mencari pekerjaan.
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK suatu kelompok penduduk tertentu adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah tangga, umur, tingkat upah, dan tingkat pendidikan.

4. Profil angkatan kerja Profil angkatan kerja meliputi umur, seks, wilayah kota dan pedesaan dan pendidikan.

## **2. Pengertian Angkatan Kerja**

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu (Sukirno,2004), angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, mencari pekerjaan, dan golongan yang menganggur. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan-golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lainnya.

Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi yaitu: 1) Jumlah penduduk yang berusia di antara 15-64 tahun, dan 2) Jumlah penduduk yang berusia diantara 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan pengangguran). Tiga golongan yang disebut pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak sedang bekerja mereka dianggap secara fisik maupun sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Dimana tiap-tiap negara memberi batasan umur yang berbeda. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk dalam bukan angkatan kerja. ( Ahmad, 2011).

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Menurut Nicholson W dalam Ahmad (2011) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu ( $q$ ) adalah  $q = f(K, L)$  dimana  $K$  merupakan modal dan  $L$  adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara  $K$  dan  $L$  maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (*Marginal Physical Product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal.



### **E. Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – propinsi – daerah).

Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir – proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi. Oleh karena itu dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya. Fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan kemasyarakatan;
2. Fungsi pengaturan, yakni merumuskan dan menegakkan pusat perundangan;
3. Fungsi pembangunan, keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana;
4. Fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang tanggungjawab eksekutif;
5. Fungsi koordinasi, yakni melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tata guna tanah regional (daerah).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono, 1996) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan daerah, karena peningkatan agregat demand akan mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi.

### **1). Belanja Modal.**

Menurut Halim dalam Nora (2013), belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13/2006 Tentang

pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP no 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

Mengacu pada pengertian belanja modal tersebut, selain pengadaan aset-aset fisik yang dikuasai oleh pemerintah, sebenarnya terdapat beberapa belanja yang berkarakteristik sebagai belanja modal yang menghasilkan aset, tetapi tidak menjadi milik Pemerintah, antara lain:

1. Biaya untuk pelaksanaan tugas pembantuan;
2. Biaya jasa konsultan untuk kekayaan intelektual;
3. Biaya jasa profesi untuk capacity building;
4. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan nilai aset;

5. Biaya pengadaan aset yang diserahkan kepada masyarakat.

Selama ini, biaya-biaya tersebut dalam APBN dikelompokkan sebagai belanja barang dan bantuan sosial, namun secara esensi keekonomian, belanja tersebut termasuk belanja modal, sehingga dapat digolongkan dalam pengeluaran investasi.

#### **F. Tinjauan Empiris**

Studi mengenai Indeks Pendidikan, Angkatan kerja dan belanja modal terhadap PDRB telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Secara ringkas disajikan ringkasan penelitian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel Tinjauan Empiris

No	Penulis	Judul	Model yang digunakan	tujuan	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
1.	Dwi Suryanto (2010) Jurnal	Analisis pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008	1. Model data <i>time-series</i> dan data <i>cross-section</i>  2. Estimasi Data Panel a. <i>least square dummy variabel</i> b. Fixed Effect Model (FEM) c. Uji-F	Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008	Variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten
2.	Budi PrasetiyoWibowo (2011)	Pengaruh Modal dan tenaga Kerja Terhadap Perkembangan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 1992-2009	1. Model data <i>time-series</i>  2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Multikolinearitas b. Uji Heteroskedastisitas c. Uji Autokorelasi  3. Uji Statistik a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) b. Uji Parsial (t-statistik)	Untuk mengetahui pengaruh Modal dan Tenaga Kerja terhadap Perkembangan Ekonomi di Provinsi Lampung tahun 1992-2009	Belanja modal, investasi swasta (PMA-PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung sedangkan tenaga kerja berpengaruh positif tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di provinsi Lampung. Sebagai upaya untuk meningkatkan PDRB provinsi lampung maka diperlukan kebijakan mendorong minat berinvestasi di daerah. pengembangan usaha sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang bersifat padat kaya agar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin.

Bersambung

1	2	3	4	5	6
3.	Redi Maulana (2013) Jurnal	Pengaruh investasi, tenaga kerja dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.	1. Model Estimasi Data Panel 2. Uji Statistik a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) b. Uji Parsial (t-statistik) c. Uji Simultan (F-Statistik) d. Uji Autokorelasi	Mengetahui pengaruh investasi, tenaga kerja dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.  Mengetahui pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi pada masing-masing daerah di Provinsi Jawa Barat menurut Tipologi Klasen.	Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi positif secara signifikan oleh investasi dan tingkat pendidikan.  Pengklasifikasian kabupaten dan kota berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita di Provinsi Jawa Barat dengan memakai alat analisis Tipologi Klasen dengan pendekatan wilayah ternyata menunjukkan banyak kab/kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2007-2011 yang termasuk kedalam daerah tertinggal. Dari 26 kab/kota sebanyak 13 kab satu kota masuk ke dalam klasifikasi daerah tertinggal dan hanya 3 daerah yang masuk daerah cepat maju dan cepat berkembang.
4.	Sayekti Suindah (2012) Jurnal	Pengaruh Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur	1. Model regresi linier berganda 2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Multikolinearitas b. Uji Heteroskedastisitas c. Uji Autokorelasi 3. Uji Statistik a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) b. Uji Parsial (t-statistik)	Pengaruh Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur	Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.



1	2	3	4	5	6
5	Mubaroq (2013) Jurnal	Pengaruh investasi pemerintah, tenaga kerja terhadap kemandirian Daerah di Indonesia	1. Uji Metode Estimasi Data Panel 2. Uji Statistik a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) b. Uji Parsial (t-statistik) c. Uji Simultan (F-statistik) d. Uji Autokorelasi	Mengetahui pengaruh investasi pemerintah, tenaga kerja terhadap kemandirian Daerah di Indonesia tahun 2007-2010	<p>Investasi pemerintah, jumlah tenaga kerja dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah investasi yang diinvestasikan oleh pemerintah maka akan semakin baik untuk pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Tenaga kerja juga menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Indonesia</p>

Bersambung

6	Paulus Uppun (2013) Jurnal	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamasa	1. Model regresi linier beranda  2. Uji Statistik b. Uji Parsial (t-statistik) c. Uji Simultan (F-statistik)	Untuk mengetahui pengaruh proporsi penduduk usia produktif, proporsi penduduk tamat SLTA, kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Mamasa, Sulawesi Selatan.	Proporsi penduduk usia produktif berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja makin meningkat pula pertumbuhan ekonomi.  Proporsi penduduk Tamat SLTA berpengaruh positif dan kesehatan juga terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten mamasa. Makin tinggi angka harapan hidup berarti kualitas kesehatan semakin baik karena penduduk yang kurang sehat produktivitasnya menurun
7	Fitrah Afrizal (2013) Skripsi	Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011	1. Model analisis inferensial.  2. Uji Statistik a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) b. Uji Parsial (t-statistik) c. Uji Simultan (F-statistik)	untuk mengetahui pengaruh tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001- 2011	Tingkat investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2011